

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Hentikan Revitalisasi Monas

Karena belum ada izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Pemprov DKI Jakarta diminta menghentikan proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Semestinya proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, dengan alokasi anggaran Rp 148 miliar dikerjakan setelah mendapat izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Masih ada prosedur yang belum dilalui. Karena itu, kami minta untuk distop dulu," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka se usai pertemuan khusus membahas revitalisasi kawasan Monas di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Pertemuan itu dihadiri anggota Komisi Pengarah, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

Pratikno menjelaskan, pembangunan dan pengelolaan kawasan Medan Merdeka, termasuk Monas, harus disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Keppres itu mengatur, pengelolaan Medan Merdeka dilakukan Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Diatur pula bahwa Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta harus meminta izin Dewan Pengarah dalam menyusun perencanaan serta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka. Tanpa itu, DKI tidak bisa melakukan pembangunan, termasuk revitalisasi kawasan Monas.

Kementerian Sekretaris Negara memang sudah menerima surat pemberitahuan revitalisasi kawasan Monas dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Namun, sesuai Keppres No 25/1995, semestinya DKI mengajukan permohonan persetujuan perencanaan pembangunan beserta pembiayaan kepada Komisi Pengarah.

Basuki Hadimuljono menambahkan, sebenarnya revitalisasi kawasan Monas sudah dilakukan sejak masa Gubernur Sutiyoso. "Ini yang keempat kali, di masa Gubernur Anies Baswedan," ujarnya.

Tiga proyek revitalisasi sebelumnya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Karena itu, meski pengerjaan fisik revitalisasi kawasan Monas sudah mencapai 80 persen, DKI tetap harus menghentikan pekerjaan hingga persetujuan dari Komisi Pengarah didapat.

Komisi Pengarah akan segera mengirim surat pemberitahuan kepada Gubernur Anies. Melalui surat itu, Komisi Pengarah akan meminta DKI untuk memenuhi prosedur yang diatur dalam Keppres No 25/1995.

Sarat masalah

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi se usai mengadakan sidak di pelataran sisi selatan Monas, Senin, mengatakan, proyek revitalisasi yang dikerjakan Pemprov DKI berbeda dengan konsep yang disampaikan kepada DPRD DKI saat pembahasan anggaran tahun 2019. Saat rapat bersama DPRD, tidak ada rencana penebangan atau pemindahan pohon-pohon di kawasan tersebut.

Di kawasan proyek, tanah sudah mulai dibeton. Sebelumnya

ada 85 pohon di sana, meliputi mahoni, palem, dan jati. Berdasarkan rencana, pelataran sisi selatan Monas itu akan dibangun plaza dan kolam. Pengerjaan saat ini sudah 88 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2020.

Menurut Prasetio, pengerjaan proyek revitalisasi Monas kali ini telah menyalahi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Monas. Pelataran sisi selatan seharusnya dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau.

Prasetio menyampaikan, pihaknya sesegera mungkin pada minggu ini akan memanggil para pihak yang terlibat dalam proyek revitalisasi Monas, di antaranya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI serta kontraktor PT Bahana Prima Nusantara.

Apabila pihak-pihak tersebut tak bisa menjelaskan konsep detail perencanaan revitalisasi dan belum mengantongi izin dari Mensesneg, DPRD tak se gan menstop program DKI. Jika diabaikan, DPRD tak akan menyetujui lagi rancangan anggaran revitalisasi Monas.

Tak ada lahan parkir

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kegiatan Monas Irfal Guci mengatakan, proyek revitalisasi tak akan mengurangi luasan ruang terbuka hijau Monas. Sebab, ke depan, lahan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) akan dihilangkan, kemudian kawasan tersebut akan ditanami pepohonan. Jumlah pohon terdampak revitalisasi akan diganti tiga kali lipat.

(NTA/BOW/HLN)